



 **BALITBANGDA
ENGERAK INOVASI**

RENCANA KERJA TAHUN 2022

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MALANG
Jl. Panji Nomor 158 Kapanjen 65163**

 **○ Balitbang@malangkab.go.id
○ Balitbang.malangkab.go.id
○ (0341) 369023**

BerAKHLAK
BERSAMA SAMA MELAKUKAN KEBERAKHLAKAN



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 167 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 4 Seri C);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 17 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
14. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan/atau dampak (*impact*).

BAB II RENCANA KERJA

Pasal 2

Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RKPD Tahun 2022.

Pasal 3

- (1) Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menguraikan program, kegiatan dan pagu indikatif Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Sistematika Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;
 - c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 - e. Penutup.
- (3) Rincian Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah wajib melaksanakan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 24 Desember 2021



Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 24 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,



WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2021 Nomor 167 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 167 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2022

**RENCANA KERJA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan tahunan dari Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan fungsi operasional dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang yang ditetapkan setiap tahun.

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2022 menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 serta sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022. Disamping itu juga menjadi pedoman penyusunan Renja PD Tahun 2022.

RKPD Tahun 2022 menjadi dasar perumusan tujuan jenis kegiatan, kelompok sasaran, hasil, manfaat dan lokasi serta prakiraan maju berdasarkan pada prioritas, sasaran, program dan pagu indikatif yang telah ditentukan dan selanjutnya akan disusun kedalam Renja PD Tahun 2022 serta memperhatikan keselarasan dan konsistensinya terhadap Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat analisis gambaran pelaksanaan kinerja perangkat Daerah serta hasil evaluasi rencana kerja perangkat daerah. Penyusunan Renja merupakan satu bagian dari tahapan penyusunan Renja yang dilakukan melalui tahapan:

- 1) Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- 2) Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
- 3) Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
- 4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- 5) Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dan
- 6) Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022 disusun sebagai penjabaran teknis operasional Rencana Strategis (Renstra) yang menjabarkan visi dan misi pemerintah daerah, sehingga dapat diwujudkan dan dicapai oleh organisasi dengan mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas, organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut.

Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022 disusun sebagai penjabaran teknis operasional Rencana Strategis (Renstra) yang menjabarkan visi dan misi pemerintah daerah, sehingga dapat diwujudkan dan dicapai oleh organisasi dengan mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas, organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut.

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2022 yang disusun saat ini merupakan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang Tahun 2005-2025. Penyusunan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2022 berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah dengan mendorong partisipasi masyarakat memerlukan suatu tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel. Sehingga dalam menyusun rencana pembangunan daerah memperhatikan 10 Asas Umum Penyelenggaraan Negara, sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
2. Asas Tertib Penyelenggara Negara yaitu menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara;
3. Asas Kepentingan Umum yaitu mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
4. Asas Keterbukaan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;
5. Asas Proporsionalitas yaitu mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara;
6. Asas Profesionalitas yaitu mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Asas Akuntabilitas yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Asas Efisiensi yaitu memperhatikan kebutuhan pelayanan yang sederhana, cepat dan murah, tidak memberikan pembebanan biaya kepada masyarakat secara tidak wajar sesuai dengan peraturan;
9. Asas Efektifitas yaitu mencapai penyelenggaraan pelayanan publik yang tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Asas Keadilan yaitu tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Adapun keterkaitan dokumen perencanaan pusat, propinsi dan daerah adalah sebagaimana digambarkan pada diagram berikut ini:



1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 4 Seri C);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 17 Seri D);

1.3 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022 dimaksudkan untuk:

- a. menjabarkan rencana strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dikaitkan dengan hasil kajian isu strategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2022.
- b. menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2022.
- c. mengukur kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- d. mengetahui permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
- e. mengetahui tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.
- f. menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022 adalah:

- a. sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. sebagai pedoman dalam penyusunan RKA;
- c. sebagai bahan penyusunan indikator evaluasi kinerja SKPD setiap tahunnya;
- d. sebagai bahan perumusan evaluasi implementasi kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
- e. sebagai bahan evaluasi, monitoring dan pelaporan capaian target kinerja RENSTRA dan RENJA.

1.4 Sistematika Penyusunan

Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun laludan Capaian Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- 2.4. Review Terhadap Rencana Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Pada tahun anggaran 2020 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.167.377.928,52 (Satu milyar seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua delapan koma lima dua rupiah) yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang terurai dalam 11 (sebelas) program dan 36 (tiga puluh Enam) kegiatan, dengan realisasi fisik mencapai 100%, dan realisasi keuangan sebesar 99%, dengan demikian Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mampu melakukan efisiensi anggaran sebesar 1%.

Target capaian kinerja pada program Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar 81%, dapat terealisasi sebesar 100%. Adapun pada Program Peningkatan Inovasi Daerah dengan target capaian kinerja sebesar 81%, mampu terealisasi sebesar 100%. Ini menunjukkan program dan kegiatan yang direncanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang pada tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini terbukti dengan telah terpenuhinya target kinerja sesuai dengan hasil/keluaran yang telah direncanakan.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Malang, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yaitu sebagai "*Pengkaji/Peneliti*", yang akan menghasilkan rekomendasi sebagai bahan perumusan dasar kebijakan dalam urusan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Malang.

Berdasarkan hasil penilaian internal atas kinerja serta hasil identifikasi terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terbatasnya tenaga peneliti;
2. Masih adanya SDM yang belum berpengalaman dibidang penelitian dan pengembangan;
3. Keterbatasan anggaran;
4. Prasarana yang belum memadai;

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka masih diperlukan peningkatan kinerja organisasi melalui program dan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang perlu dilaksanakan secara berkala, sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2022, maka strategi dan kebijakan yang ditempuh oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Strategi

- a. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga Litbang sebagai upaya untuk mencapai hasil penelitian dan pengembangan sehingga mampu menyajikan bahan perumusan kebijakan daerah.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah serta memantapkan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain dalam upaya penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan rencana pembangunan daerah.
- c. Meningkatkan kinerja penelitian dan pengembangan melalui Kerjasama dengan lembaga penelitian lainnya (Pihak ketiga/swasta) sebagaimana diatur dalam Perpres No. 16 tahun 2018 dan menata personil yang ada dengan mengoptimalkan serta mensinergikan kinerja personil dengan penempatan posisi sesuai dengan keahliannya.
- d. Meningkatkan kualitas kelitbangan dengan cara meningkatkan kerja sama dengan Perangkat Daerah lain dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

2. Kebijakan

- a. Mengisi kekosongan tenaga Peneliti;

- b. mengoptimalkan Peningkatan Jaringan kerjasama penelitian dan pengembangan serta Informasi;
- c. Memprioritaskan program yang bersifat penguatan dan pengembangan internal Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang meliputi sarana, prasarana, kelembagaan, Sumber Daya Aparatur dan publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
- d. Memprioritaskan program yang mengarah pada sasaran penelitian strategis dan kajian isu aktual di Bidang Pemerintahan, di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Investasi, di Bidang Pembangunan serta di Bidang Sosial dan Kemasyarakatan;
- e. Mengoptimalkan peran dan fungsi Dewan Riset Daerah (DRD).

Adapun gambaran rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2021 tersaji pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Keputusan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD s/d tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Program dan Keputusan s/d Tahun 2021	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program /Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (2021)	Performa Realisasi Capaian Target Renstra/Program/Kegiatan Daerah s.d Th. 2021
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		
I	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 5-7-9 11 = 10/4
I	5.05.01 Urusan 1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Perencanaan Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Keputusan (Output)	100%	100%	99,8%	99,8%	99,8%	100%	
		Presentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	100%	100%					
		Presentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Aparatur	100%	100%					
		Presentase Penunjang Kerja Aparatur	100%	100%					
		Presentase Peningkatan Kapabilitas Pegawai di Perangkat Daerah	100%	100%					
		Presentase Dokumen Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	100%	100%					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD s/d Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Program Hasil dan Seluruh Kegiatan s/d Tahun 2019	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program /Ekaplan Renja PD Tahun berjalan (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra/Program/Kegiatan Daerah s.d Th. 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 - 5-7-9	11 = (10/4)
			50%							
1	5.05.01.2.01	Pencapaian, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Penelitian Pengkembangan Yang Tersusun							
1	5.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen (informasi) Penelitian dan Pengembangan	2 dok	2 dok	2 dok	100	2 dok	6 dok	66,65
2	5.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (Laku IP) Profil Kinerja PD/daerah/kecamatan masyarakat	3 buku	4 buku	4 buku	100	7 buku	25 Buku	71,42
2	5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
3	5.05.01.2.02.01	Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji pokok dan tunjangan sesuai dengan aturan yang berlaku	0 orang	0 orang	0 orang	0	25 orang	25 orang	100
4	5.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pejabat Penggerak Administrasi Keuangan	24 OB	192 OB	192 OB	100	16 OB	202 OB	331,43
5	5.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	2 buku	1 buku	1 buku	100	2 Buku	6 buku	40
6	5.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semester 1 dan semester 2	4 buku	2 buku	2 buku	100	2 buku	8 buku	80

Kode	Uraian/Bidang Uraian/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD s/d Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Program Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program /Kegiatan Renstra PD Tahun berjalan (2021)	Perkembangan Realisasi Capaian Target Renstra/Program/Kegiatan Renstra Peringkat Daerah s/d Th. 2021
					Target Renyta Tahun 2020	Realisasi Renyta Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 5+7-9 (10/4)
3	5.05.01.2.05 Administrasi Kependidikan Peringkat Daerah								
7	5.05.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	165 orang	24 orang	31 orang	11 orang	100	45 orang	80 orang
4	5.05.01.2.06 Administrasi Umum Peringkat Daerah								
8	5.05.01.2.06.01 Pegawai komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen alat alat listrik dan elektrokit	36 jenis	360 kali	25 kali	25 kali	100	25 kali	410 kali
9	5.05.01.2.06.02 Penyediaan, Perawatan dan Perlangkapan Karier	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	400 jenis	90 HOK	93 HOK	90 HOK	100	93 HOK	270 HOK
10	5.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan cetak yang disediakan	35 jenis	150 HOK	150 HOK	150 HOK	100	150 HOK	480 HOK
11	5.05.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan baku dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	15 jenis	5 komponen	9 komponen	9 komponen	100	9 komponen	23 komponen
12	5.05.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman berisi pegawai, rapat, dan tamu yang disediakan	3240 HOK	1407 HOK	10 HOK	13 HOK	100	750 HOK	2187 HOK
13	5.05.01.2.06.09 Pengelolaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai memenuhi pengawasan dinas ke dalam daerah/dinas keluar daerah	1177 HOK	974 HOK	206 HOK	206 HOK	100	240 HOK	1420 HOK
5	5.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah								
14	5.05.01.2.08.01 Pengiriman Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan keluar	8500 buah	1712 buah	1700 buah	1700 buah	100	1700 buah	5112 buah
									66,14

Kode	Uraian/Deskripsi Uraian/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran/ Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Program/Kegiatan dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program/Kegiatan/ Sasaran/ Tahun berjalan (2021)	Program Realisasi Capaian Target Rencana Program/Kegiatan Daerah s/d Th. 2021	
					Target Perjanjian Tahun 2020	Realisasi Perjanjian Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
15	5.05.01.2.09.02	Persediaan Jasa Komunikasi, Borneo Daya Air dan Listrik	Jumlah penyelesaian listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48 bulan	60
16	5.05.01.2.08.04	Persediaan Jasa Pelayanan Umum Daerah	Jumlah petugas kebersihan	17 OU	1 OB	1 OB	100	2 OB	20 OB	200
6	5.05.01.2.09	Pembangunan Barang Milik Daerah Daerah								
17	5.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peranginan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan roda 4 empat dan roda 2 dua yang dipelihara dan berkala	10 unit	5 unit	5 unit	100	5 unit	20 unit	63,33
18	5.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100	1 jenis	3 jenis	300
19	5.05.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	27 jenis	26 jenis	28 jenis	100	27 jenis	82 jenis	303,70
II	5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan	Presentase Hasil Kegiatan Kelibangan Yang Sesuai Dengan Strategi Pengembangan Pemikab Malang	100%						

Kode	Uraian/Bidang Uraian/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Remeza s/d Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Program Hasil dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program /Kegiatan Remeza PD Tahun 2021 (2021)	Perluasan Realisasi Capaian Target Remeza Program/Kegiatan Daerah s/d Th. 2021	
					Target Pengs Tahun 2020	Realisasi Pengs Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 5-7-9	11 = (10/9)
1	5.05.02.2.01	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan								
1	5.05.02.2.01.01	Realisasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	12 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	3 dokumen	6 dokumen	50
2	5.05.02.2.01.05	Realisasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	13 dokumen	4 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	9 dokumen	66,67
3	5.05.02.2.01.10	Realisasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	13 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	3 dokumen	7 dokumen	76,92
2	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan								
1	5.05.02.2.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pembelajaran Perencanaan dan Perlindungan Anak	13 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	3 Dokumen	9 Dokumen	66,23

Kode	Urusan/Bidang Crasuan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Tingkat Capaian Program Renstra w/cTahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program /Kegiatan Renja PD berjalan (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Peringkat Daerah s.d Th. 2021
					Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	11 = (10/4)
2	5.05.02.2.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kecelakaan	1. Jumlah usulan judul penelitian, 2. Jumlah dokumen hasil kajian penelitian/kajian/studi/analisis, 3. Jumlah modul terapan, 4. Jumlah naskah jurnal hasil kegiatan	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	3 Dokumen	10 - 5+7+9 3 Dokumen
3	5.05.02.2.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1. Jumlah usulan judul penelitian, 2. Jumlah dokumen hasil kajian penelitian/kajian/studi/analisis, 3. Jumlah modul terapan, 4. Jumlah naskah jurnal hasil kegiatan	12 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	3 Dokumen	58,33
3	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan							
1	5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Jumlah usulan judul penelitian, 2. Jumlah dokumen hasil kajian penelitian/kajian/studi/analisis, 3. Jumlah modul terapan, 4. Jumlah naskah jurnal hasil kegiatan	13 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	100	3 dokumen	69,23
2	5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Perلمان, Perkebunan dan Pangan	1. Jumlah usulan judul penelitian, 2. Jumlah dokumen hasil kajian penelitian/kajian/studi/analisis, 3. Jumlah modul terapan, 4. Jumlah naskah jurnal hasil kegiatan	12 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	3 dokumen	58,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Rencana s/d Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kebijakan Kegiatan s/d Tahun 2019	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program /Kegiatan Rencana s/d Tahun 2021 (2021)	Perbedaan Realisasi Capaian Target Rencana/Program/Kegiatan Rencana s/d Th. 2021	
					Target Rencana Tahun 2020	Realisasi Rencana Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 9-7+9	11 = (10/4)
3	5.05.02.2.03.13 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1. Jumlah usulan judul penelitian, 2. Jumlah dokumen hasil kajian penelitian/kajian/study/analisis, 3. Jumlah modul terapan, 4. Jumlah naskah jurnal hasil kegiatan	13 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	3 dokumen	7 dokumen	52,31
4	6.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi									
1	5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Penerapannya di bidang Teknologi dan Inovasi	1. Jumlah usulan judul penelitian, 2. Jumlah dokumen hasil kajian penelitian/kajian/study/analisis, 3. Jumlah modul terapan, 4. Jumlah naskah jurnal hasil kegiatan	13 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	3 dokumen	4 dokumen	34,18
2	5.05.02.2.04.02 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model/ Replikasi dan Inovasi di Bidang Duluai Inovasi dan Penerapan Teknologi	1. Jumlah usulan judul penelitian, 2. Jumlah dokumen hasil kajian penelitian/kajian/study/analisis, 3. Jumlah modul terapan, 4. Jumlah naskah jurnal hasil kegiatan	13 dokumen	0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	3 dokumen	5 dokumen	76,92
3	5.05.02.2.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah dokumen Roadmap SIDs yang terurus (KOMIDED dan INOTEN)	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	100	1 dokumen	0 dokumen	
4	5.05.02.2.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kebudayaan	1. Jumlah usulan judul penelitian, 2. Jumlah dokumen hasil kajian penelitian/kajian/study/analisis	12 dokumen	0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	3 dokumen	5 dokumen	41,66

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Rencana PD s/d tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program /Kegiatan Rencana PD Tahun berjalan (2021)	Perubahan Realisasi Capaian Target Rencana Program/Kegiatan Rencana s.d th. 2021
					TARGET Rencana Tahun 2020	Realisasi Rencana Tahun 2020	Tingkat Tercapai Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	10 = 5+7+9	Tingkat Capaian realisasi target Rencana (%)
		3.jumlah modul terapan, 4.jumlah naskah - jurnal hasil kegiatan							11 = (10/4)

Catatan : *) karena adanya perubahan Indikator satuan pada RPJMD sehingga hasil capaian kinerja tidak dapat diakumulasi

Catatan penting :

- Dari tabel 2.1 diatas, terlihat bahwa program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, di awal periode Renstra tercapai 100%.
- Berpedoman pada permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang kelitbangan Program penelitian dan pengembangan terdiri dari 2 (Dua) Program, 11 (Sebelas) Kegiatan dan 37 (Tiga Puluh Tujuh) Sub kegiatan, namun yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2020 masih 10 (sepuluh) kegiatan dengan tingkat capaian rata-rata 90%. Hal ini disebabkan harus menyesuaikan dengan alokasi anggaran yang ada. Oleh karenanya kegiatan yang dilaksanakan hanya yang bersifat prioritas.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Obyek (Sasaran Utama) pelayanan adalah Masyarakat Kabupaten Malang, Perangkat Daerah se-Kabupaten Malang, Kecamatan se-Kabupaten Malang, Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta. Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 pasal 4, disebutkan bahwa kelitbangan terdiri atas :

- a. Kelitbangan Utama;
- b. Kelitbangan Pendukung.

Dimana kelitbangan tersebut melalui tahapan: perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam pasal 5 Permendagri nomor 17 tahun 2016, disebutkan bahwa Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. Penelitian;
- b. Pengkajian;
- c. Pengembangan;
- d. Perencanaan;
- e. Penerapan;
- f. Pengoperasian; dan
- g. Evaluasi kebijakan.

Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan Pemerintahan.

Kelitbangan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain melalui:

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan;
- b. Penguatan ketatalaksanaan;
- c. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia;
- d. Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program;
- e. Fasilitasi inovasi daerah;
- f. Pengembangan basis data kelitbangan;
- g. Penguatan kerjasama kelitbangan; dan
- h. Pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya.

Dalam rangka mendukung kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diperlukan kegiatan penunjang antara lain melalui:

- a. fasilitasi, dilakukan melalui konsultasi, koordinasi dan desiminasi;
- b. Advokasi, dilakukan melalui forum pakar/tenaga ahli dan pendampingan;
- c. Asistensi, dilakukan melalui lokakarya, kolaborasi dan penyuluhan;
- d. Supervisi dilakukan melalui pengarahan, pembimbingan dan pengendalian;
- e. Edukasi, dilakukan melalui bimbingan teknis, adopsi dan modifikasi.

Kinerja pelayanan Badan penelitian dan pengembangan daerah ditandai dengan 2 (dua) indikator, yaitu :

1. Persentase Hasil Kajian yang Ditindaklanjuti;
2. Persentase Hasil Kajian yang berhasil dipublikasikan di jurnal ilmiah Bereputasi.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Malang

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Indikator Kinerja Utama													
ESELON II													
1	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	-	-	100%	100%	-	-	99,8%	100%	-	-	-	
2	Persentase Hasil Kegiatan Kelembagaan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	-	-	80%	81%	-	-	80%	81%	-	-	-	
ESELON III													
1	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Sesuai Aturan dan Tepat Waktu	-	-	-	9	-	-	-	0	-	-	-	
2	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun Sesuai Aturan dan Tepat Waktu	-	-	-	46	-	-	-	41	-	-	-	
3	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Disusun Sesuai Aturan dan Tepat Waktu	-	-	-	45	-	-	-	4	-	-	-	
4	Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang Disusun Sesuai Aturan dan Tepat Waktu	-	-	-	1089	-	-	-	61	-	-	-	
5	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diusulkan Sesuai Aturan yang Berlaku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Jumlah Dokumen Perundang-undangan yang Disusun Sesuai Aturan dan Tepat Waktu	-	-	-	1714	-	-	-	531	-	-	-	
7	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipeliharakan	-	-	-	33	-	-	-	9	-	-	-	
8	Jumlah Dokumen Kelembagaan yang Sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	-	-	-	9	-	-	-	0	-	-	-	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
9	Jumlah Dokumen Kelengkapan yang Sesuai dengan strategi pembangunan penkab malang	-	-	9 Dokumen	-	-	-	6 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	-	
10	Jumlah Dokumen Kelengkapan yang Sesuai dengan strategi pembangunan penkab malang	-	-	9 Dokumen	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	-	
11	Jumlah Dokumen Kelengkapan yang Sesuai dengan strategi pembangunan penkab malang	-	-	12 Dokumen	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	-	
ESLON IV														
1	Jumlah Dokumen Informasi Penelitian dan Pengembangan	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	2 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	-	
2	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP) profil kinerja PD/urver/lepuasan masyarakat	-	-	4 Laporan	7 Dokumen	-	-	4 Laporan	0 Dokumen	-	-	-	-	
3	Jumlah ASN yang membayar gaji pokok dan tunjangan sesuai dengan aturan yang berlaku	-	-	-	25 Orang	-	-	-	25 Orang	-	-	-	-	
4	Jumlah pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	-	-	192 OB	16 OB	-	-	192 OB	16 OB	-	-	-	-	
5	Jumlah dokumen laporan keuangan akhiz tabut	-	-	1 Buku	3 Dokumen	-	-	1 Buku	0 Dokumen	-	-	-	-	
6	Jumlah dokumen laporan keuangan semester 1 dan semester 2	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	2 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	-	
7	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	-	-	11 Orang	45 Dokumen	-	-	11 Orang	4 Dokumen	-	-	-	-	
8	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	-	-	12 Komponen	9 Jenis	-	-	12 Komponen	8 Jenis	-	-	-	-	
9	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	-	-	83 Jenis	80 Jenis	-	-	83 Jenis	0 Jenis	-	-	-	-	
10	Jumlah balutan cetakan yang disediakan	-	-	7 Jenis	7 Jenis	-	-	7 Jenis	2 Jenis	-	-	-	-	
11	Jumlah bahan bacaan dan peracuan perundang-undangan yang disediakan	-	-	24 Elsemplar	3 Jenis	-	-	24 Elsemplar	1 Jenis	-	-	-	-	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Rensra PD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
12	Jumlah Makanan dan Minuman bahan pogram,rapst, dan tamu yang disediakan	-	-	19 Kali	750 HOK	-	-	10 Kali	50 HOK	-	-	-	-	
13	Jumlah Pegawai memenuhi penggunaan dinas ke dalam daerah/dinas keluar daerah	-	-	206 HOK	340 HOK	-	-	206 HOK	20 HOK	-	-	-		
14	Jumlah registrasi surat masuk dan keluar	-	-	1700 Buah	1700 Buah	-	-	1700 Buah	530 Buah	-	-	-		
15	Jumlah Penyediaan listrik, air minum/fair bersih, telekomunikasi dan internet	-	-	12 Rekening	12 Bulan	-	-	12 Rekening	0 Bulan	-	-	-		
16	Jumlah petugas kebersihan	-	-	1 Paket	2 OB	-	-	1 Paket	1 GB	-	-	-		
17	Jumlah kendaraan roda 4 empat dan roda 2 dua yang dipelihara dan berkala	-	-	5 Unit	5 Unit	-	-	5 Unit	0 Jenis	-	-	-		
18	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	-	-	1 Paket	1 Jenis	-	-	1 Paket	1 Jenis	-	-	-		
19	Jumlah perlengkapan Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	-	-	28 Unit	27 Jenis	-	-	28 Unit	8 Jenis	-	-	-		
20	1-Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan 2. Jumlah Kegiatan, Fasilitas, aset/kegiatan dan evaluasi hasil kegiatan	-	-	1 Dokumen	3 Dokumen	-	-	1 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-		
21	1-Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan 2. Jumlah Kegiatan, Fasilitas, aset/kegiatan dan evaluasi hasil kegiatan	-	-	2 Dokumen	3 Dokumen	-	-	2 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-		
22	1-Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan 2. Jumlah Kegiatan, Fasilitas, aset/kegiatan dan evaluasi hasil kegiatan	-	-	1 Dokumen	3 Dokumen	-	-	1 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-		
23	1-Jumlah usulan judul penelitian, 2. Jumlah dokumen hasil penelitian, 3. Jumlah kajian/pengembangan/ studi/analisa, 3. Jumlah modul terapan, 4-jumlah naskah jurnal hasil kegiatan	-	-	2 Dokumen	3 Dokumen	-	-	2 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-		
24	1-Jumlah usulan judul penelitian, 2. Jumlah dokumen hasil penelitian, 3. Jumlah kajian/pengembangan/ studi/analisa, 3. Jumlah modul terapan, 4-jumlah naskah jurnal hasil kegiatan	-	-	1 Dokumen	3 Dokumen	-	-	1 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-		

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Ranses PD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Caraker Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
25	1. Jumlah usulan judul penelitian, 2. Jumlah dokumen hasil kajian penelitian/kajian/studi/analisa, 3. Jumlah modul terapan, 4. Jumlah naskah jurnal hasil kegiatan	-	-	2 Dokumen	3 Dokumen	-	-	2 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	-	
26	1. Jumlah usulan judul penelitian, 2. Jumlah dokumen hasil kajian penelitian/kajian/studi/analisa, 3. Jumlah modul terapan, 4. Jumlah naskah jurnal hasil kegiatan	-	-	2 Dokumen	3 Dokumen	-	-	2 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	-	
27	1. Jumlah usulan judul penelitian, 2. Jumlah dokumen hasil kajian penelitian/kajian/studi/analisa, 3. Jumlah modul terapan, 4. Jumlah naskah jurnal hasil kegiatan	-	-	1 Dokumen	3 Dokumen	-	-	1 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	-	
28	1. Jumlah usulan judul penelitian, 2. Jumlah dokumen hasil kajian penelitian/kajian/studi/analisa, 3. Jumlah modul terapan, 4. Jumlah naskah jurnal hasil kegiatan	-	-	2 Dokumen	3 Dokumen	-	-	2 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	-	
29	1. Jumlah usulan judul penelitian, 2. Jumlah dokumen hasil kajian penelitian/kajian/studi/analisa, 3. Jumlah modul terapan, 4. Jumlah naskah jurnal hasil kegiatan	-	-	1 Dokumen	3 Dokumen	-	-	1 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	-	
30	1. Jumlah usulan judul penelitian, 2. Jumlah dokumen hasil kajian penelitian/kajian/studi/analisa, 3. Jumlah modul terapan, 4. Jumlah naskah jurnal hasil kegiatan	-	-	2 Dokumen	3 Dokumen	-	-	2 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	-	
31	Jumlah dokumen Roadmap SIDA yang tersusun (KA, DSD dan NOTES)	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	3 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	-	
32	1. Jumlah usulan judul penelitian, 2. Jumlah dokumen hasil kajian penelitian/kajian/studi/analisa, 3. Jumlah modul terapan, 4. Jumlah naskah jurnal hasil kegiatan	-	-	2 Dokumen	3 Dokumen	-	-	2 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	-	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang memiliki tugas pokok :

- a. Menyelenggarakan fungsi kelitbangan Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Malang;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Sedangkan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah :

- a. Menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program kelitbangan pemerintahan kabupaten/kota;
- b. Melaksanakan kelitbangan di pemerintahan Kabupaten/Kota;
- c. Melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- d. Melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah;
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan;
- f. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan kabupaten/kota;
- g. Memastikan tersusunnya kebijakan dan atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di kabupaten/kota;
- h. Memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati/Walikota dan perangkat daerah di kabupaten/kota;
- i. Melaksanakan administrasi kelitbangan;
- j. Mengeluarkan rekomendasi dan melakukan pendampingan penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota.
- l. Mengeluarkan rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; serta
- m. Meminta laporan atas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh warga negara asing;
- n. Pembinaan UPT; dan

- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Malang yaitu Terwujudnya Kabupaten Malang MAKMUR yang dijabarkan dengan "Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika", khususnya pada Misi ke 3 " Misi ini dimaknai untuk mewujudkan kualitas pelayanan aparatur pemerintah yang unggul melalui inovasi tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka membangun sistem layanan yang efektif, efisien, dan akuntabel sekaligus untuk mempercepat peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)" Misi ini juga dimaknai untuk mewujudkan pembangunan kemandirian Desa yang difokuskan pada konektivitas dan aksesibilitas layanan dalam rangka membangun Desa mandiri sebagai daya saing daerah melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan optimalisasi kawasan terpadu.

Maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang yang memiliki fungsi menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program kelitbangan pemerintahan kabupaten/kota, melaksanakan kelitbangan di pemerintahan Kabupaten/Kota, melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah, melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan, melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan kabupaten/kota, memastikan tersusunnya kebijakan dan atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di kabupaten/kota, memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati/Walikota dan perangkat daerah di kabupaten/kota, melaksanakan administrasi kelitbangan, mengeluarkan rekomendasi dan melakukan pendampingan penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.

Sehubungan dengan hal tersebut maka peran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah mewujudkan pemerintahan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintahan yang bersih), berkeadilan dan demokratis. Sedangkan berkaitan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Malang, peran

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list ke working plan*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi penelitian/pengkajian dalam hal ini Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang yang membantu Bupati Malang dalam penyusunan dasar perumusan kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan penelitian atau pengkajian dalam penyusunan dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Malang mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan penelitian/pengkajian tersebut meliputi :

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan penelitian dan terpenuhinya sumber daya manusia dibidang Penelitian dan Pengembangan.
2. Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
3. Adanya jaringan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan Perguruan Tinggi serta lembaga lembaga penelitian.
4. Adanya penghargaan terhadap hasil-hasil litbang.

Pengkajian tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk penelitian/pengkajian. Beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dalam peningkatan kualitas produk penelitian/pengkajian adalah sebagai berikut :

1. SDM yang ada masih belum berpengalaman dibidang penelitian dan pengembangan;
2. Keterbatasan anggaran;
3. Prasarana yang ada belum memadai;
4. Terbatasnya tenaga peneliti.

Threats (tantangan) :

1. Tingkat kesejahteraan mayoritas masyarakat yang berlatar belakang petani dan buruh masih rendah;
2. Masih adanya dualisme pelaksanaan penelitian dan pengembangan di instansi lain;
3. Sulitnya berkoordinasi dengan instansi lain dalam pelaksanaan bidang penelitian dan pengembangan;
4. Belum adanya pemahaman yang sama tentang peranan BALITBANG sebagai lembaga penghasil Rekomendasi Kebijakan;
5. Belum adanya penghargaan terhadap hasil-hasil Penelitian/Kajian.

Opportunities (peluang) :

1. Banyak permasalahan di bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Keuangan, Pembangunan serta Politik dan Kemasyarakatan;
2. Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi;
3. Banyak Lembaga-lembaga Litbang (PTN/PTS, Balai-balai Penelitian, Lembaga-lembaga peneliti / Jasa Konsultan lainnya) yang bisa menjadi mitra kerja;
4. Tersedianya produk hasil penelitian lainnya yang dapat dipakai sebagai bahan acuan untuk pengumpulan data dan informasi yang valid;
5. Kondisi Kabupaten Malang yang kondusif.

Faktor-faktor kunci keberhasilan adalah topik atau bidang yang berkaitan secara luas dengan Misi, untuk mengarahkan perumusan tujuan organisasi. Faktor-faktor kunci keberhasilan memungkinkan manajemen untuk mengembangkan suatu rencana strategis yang lebih mudah untuk mengkomunikasikan dan menerapkannya. Faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Dalam upaya mencapai tujuan organisasi yang efektif maka ditetapkan faktor-faktor kunci keberhasilannya sebagai berikut:

1. Terpenuhinya Sumber Daya manusia dibidang Penelitian dan Pengembangan;
2. Tercukupinya dukungan pendanaan kegiatan Penelitian/kajian secara proporsional guna mencukupi kebutuhan SKPD terhadap hasil penelitian/kajian serta pengembangan;
3. Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai;
4. Adanya jaringan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan lembaga-lembaga litbang;
5. Adanya penghargaan terhadap hasil-hasil litbang.

Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

Sarana dan Prasarana

1. Mengembangkan TI dan GIS serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan penelitian dan pengembangan yang lebih baik dalam menunjang perumusan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
4. Optimalisasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tahun 2022 merupakan awal perjalanan RPJMD Kabupaten Malang tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disingkat dengan RPJMD merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Dan dokumen ini dapat direvisi dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan agar dapat tercapai target yang telah ditetapkan. Rancangan awal RKPD Badan Penelitian dan Pengembangan disusun berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 masa transisi dan membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2026 yang berdasarkan pertimbangan atas kinerja pencapaian target Renstra, dan target kinerja yang dicapai oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, dengan arahan Kepala Daerah terkait dengan program prioritas kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan setelah dilaksanakan analisa kebutuhan dan ketentuan mengenai nomenklatur program kegiatan, maka untuk mendukung kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dihasilkan sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan disiplin aparatur utamanya dalam berpakaian dinas pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka Perlu di tingkatkannya kegiatan yakni Administrasi Kepegawaian Umum Perangkat Daerah di Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya ;
2. Pada Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi ada Penambahan Sub Kegiatan Yakni desiminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
3. Pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan perlu ditambahkan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Penelitian dan Pengembangan Pariwisata, dan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan Evaluasi Kebijakan;

4. Pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan perlu ditambahkan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah, Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan, dan Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika dan Evaluasi Kebijakan;
5. Pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan perlu ditambahkan Kegiatan Evaluasi Bidang Pemerintahan Umum dan Desa, Evaluasi Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Evaluasi Bidang Otonomi Daerah dan Kerjasamadan Evaluasi Kebijakan;
6. Beberapa program, kegiatan dan Sub Kegiatan lain yang ada masih mendukung pencapaian sasaran sehingga relevan untuk tetap dilaksanakan seperti Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan generik yang berkaitan dengan kegiatan kelitabangan pendukung yaitu Program Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Pengembangan Data/informasi;

Rancangan awal Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang tahun 2022 yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Malang, terdiri dari 2 (dua) program dan 11 (sebelas) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) Sub Kegiatan maka pada tahun setelah dilakukan analisa kebutuhan sesuai dengan RENSTRA tahun 2022 tersaji dalam tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MALANG
 TAHUN 2022**

No.	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang											
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Baliwang Kab. Malang	Jumlah Dokumen dokumen penelitian dan pengembangan (jurnal, jala-rada, ARD)	2 dokumen	418.143.000	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Baliwang Kab. Malang	Jumlah Dokumen informasi penelitian dan pengembangan (jurnal, jala-rada, ARD)	2 dokumen	418.143.000	
2	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Baliwang Kab. Malang	Jumlah dokumen laporan kinerja (LKR-IP/profilic kinerja, PD/aurvit keputusan masyarakat) (buku)	7 buku	13.591.700	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Baliwang Kab. Malang	Jumlah dokumen laporan kinerja (LKR-IP/profilic kinerja, PD/aurvit keputusan masyarakat) (buku)	7 buku	13.591.700	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Baliwang Kab. Malang	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	1 tahun	3.754.338.333	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Baliwang Kab. Malang	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	1 tahun	3.754.338.333	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Baliwang Kab. Malang	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (JOB)	16 00	682.206.348	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Baliwang Kab. Malang	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (JOB)	21 00	682.206.348	
3	Kordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Baliwang Kab. Malang	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun (buku)	3 buku	17.199.000	Kordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Baliwang Kab. Malang	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun (buku)	3 buku	17.199.000	
4	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semester SKPD	Baliwang Kab. Malang	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (buku)	2 buku	2.834.000	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semester SKPD	Baliwang Kab. Malang	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (buku)	2 buku	2.834.000	
Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah											
1	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Baliwang Kab. Malang	Jumlah sarana dan prasarana pegawai (orang)	47 Orang	32.900.000	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Baliwang Kab. Malang	Jumlah sarana dan prasarana pegawai (orang)	47 Orang	32.900.000	
2	Pengadaan pakuhan dinas beserta atribut kelengkapannya	Baliwang Kab. Malang	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakuhan dinas (orang)	47 Orang	18.800.000	Pengadaan pakuhan dinas beserta atribut kelengkapannya	Baliwang Kab. Malang	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakuhan dinas (orang)	47 Orang	18.800.000	

No.	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program / Kegiatan	Lokal	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Pembelian dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Balibang Kab. Malang	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	45 Orang	185.321.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Balibang Kab. Malang	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	45 Orang	185.321.000	
4	Umbangan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Balibang Kab. Malang	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	47 Orang	164.500.000	Umbangan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Balibang Kab. Malang	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	47 Orang	164.500.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
1	Persediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Balibang Kab. Malang	Jumlah persediaan komponen alat listrik dan elektronik	9 jenis	7.540.000	Persediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Balibang Kab. Malang	Jumlah persediaan komponen alat listrik dan elektronik	9 jenis	7.540.000	
2	Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balibang Kab. Malang	Jumlah barang alat tulis kantor yang disediakan	80 Jenis	61.221.000	Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balibang Kab. Malang	Jumlah barang alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	80 Jenis	61.221.000	
3	Persediaan Barang Cetak dan Pengabdian	Balibang Kab. Malang	Jumlah barang cetak yang disediakan (jenis)	7 jenis	77.651.000	Persediaan Barang Cetak dan Pengabdian	Balibang Kab. Malang	Jumlah barang cetak yang disediakan (jenis)	7 jenis	77.651.000	
4	Persediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Balibang Kab. Malang	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (jenis)	3 jenis	7.327.000	Persediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Balibang Kab. Malang	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (jenis)	3 jenis	7.327.000	
5	Facilitasi Kunjungan Tamu	Balibang Kab. Malang	Jumlah Makanan dan minuman pegawai, rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	750 HOK	66.687.000	Facilitasi Kunjungan Tamu	Balibang Kab. Malang	Jumlah Makanan dan minuman pegawai, rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	750 HOK	66.687.000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balibang Kab. Malang	Jumlah pegawai memenuhi undangan dinas ke luar / dinas ke dalam daerah (HOK)	240 HOK	232.202.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balibang Kab. Malang	Jumlah pegawai memenuhi undangan dinas ke luar / dinas ke dalam daerah (HOK)	240 HOK	232.202.000	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balibang Kab. Malang			539.777.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balibang Kab. Malang			539.777.000	
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balibang Kab. Malang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	10 Unit	100.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balibang Kab. Malang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	10 Unit	100.000.000	

No.	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balitbang Kab. Malang	Jumlah Register surat masuk dan keluar (Bulan)	1700 Buah	8.793.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balitbang Kab. Malang	Jumlah Register surat masuk dan keluar (Bulan)	1700 Buah	8.793.000	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Balitbang Kab. Malang	Jumlah penyediaan listrik, air minum, air bersih, telekomunikasi dan internet (bulan)	12 Bulan	5.804.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Balitbang Kab. Malang	Jumlah penyediaan listrik, air minum, air bersih, telekomunikasi dan internet (bulan)	12 Bulan	5.804.000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balitbang Kab. Malang	Jumlah Pengasas Kebersihan	2 OB	31.656.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Umbung Kab. Malang	Jumlah Pengasas Kebersihan	2 OB	31.656.000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah/Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balitbang Kab. Malang	Jumlah kendaraan roda 4 jemput dan roda 2 (dua) yang dipelihara rutin berkala (Unit)	5 Unit	44.783.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Malang	Jumlah kendaraan roda 4 (jemput) dan roda 2 (dua) yang dipelihara rutin berkala (Unit)	5 Unit	44.783.000	
2	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balitbang Kab. Malang	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara (Jenis)	1 Jenis	52.251.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balitbang Kab. Malang	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara (Jenis)	1 Jenis	52.251.000	
3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balitbang Kab. Malang	Jumlah Peringkasan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/berkala (Jenis)	27 Jenis	19.785.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balitbang Kab. Malang	Jumlah Peringkasan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/berkala (Jenis)	27 Jenis	19.785.000	
11	Program Penelitian dan Pengembangan										
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan pengajian Peraturan										
1	Realisasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Balitbang Kab. Malang	1. Jumlah Usulan Judul penelitian, 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Study/Analisis, 3. Jumlah Model Terapan, 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 Laporan	93.929.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Balitbang Kab. Malang	1. Jumlah Usulan Judul penelitian, 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Study/Analisis, 3. Jumlah Model Terapan, 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 Laporan	93.929.000	

No.	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebijakan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Penelitian, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Perencanaan Ketenagahaan Desa	Balitbang Kab. Malang	1. Jumlah Dokumen hasil kegiatan 2. Jumlah kegiatan penelitian, analisis, sosialisasi dan evaluasi hasil kegiatan	1 dokumen	94.244.000	Posisis, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Perencanaan Ketenagahaan Desa	Balitbang Kab. Malang	1. Jumlah Dokumen hasil kegiatan 2. Jumlah kegiatan penelitian, analisis, sosialisasi dan evaluasi hasil kegiatan	1 dokumen	94.244.000	
3	Pengelolaan Data Kelibangan dan Penelitian	Balitbang Kab. Malang		1 dokumen	94.038.000	Pengelolaan Data Kelibangan dan Penelitian	Balitbang Kab. Malang		1 dokumen	94.038.000	
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Kependudukan										
1	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan kebudayaan	Balitbang Kab. Malang	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Rujukan Penelitian/Kajian/Studi/Analisis 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dokumen	100.100.000	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan kebudayaan	Balitbang Kab. Malang	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Rujukan Penelitian/Kajian/Studi/Analisis 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dokumen	100.100.000	
2	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Balitbang Kab. Malang	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Rujukan Penelitian/Kajian/Studi/Analisis 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dokumen	100.100.000	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Balitbang Kab. Malang	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Rujukan Penelitian/Kajian/Studi/Analisis 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dokumen	100.100.000	
3	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Balitbang Kab. Malang	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Rujukan Penelitian/Kajian/Studi/Analisis 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dokumen	100.100.000	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Balitbang Kab. Malang	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Rujukan Penelitian/Kajian/Studi/Analisis 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dokumen	100.100.000	
3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Pembangunan										

No.	RUPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		TARGET Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penelitian dan Pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah	Baliwang Kab. Malang	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/A nalisia 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dokumen	93.248.000	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah	Baliwang Kab. Malang	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi /Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dokumen	93.248.000	
2	Penelitian dan Pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan	Baliwang Kab. Malang	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/A nalisia 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dokumen	94.075.000	Penelitian dan Pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan	Baliwang Kab. Malang	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi /Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dokumen	94.075.000	
3	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Baliwang Kab. Malang	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/A nalisia 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dokumen	94.884.000	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Baliwang Kab. Malang	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi /Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dokumen	94.884.000	
4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi										
1	Penelitian dan Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Baliwang Kab. Malang	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/A nalisia 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dokumen	125.125.000	Penelitian dan Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Baliwang Kab. Malang	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi /Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dokumen	125.125.000	
2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun / Model Reproduksi Inovasi		1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian	1 dokumen	125.125.000	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun / Model Reproduksi Inovasi		1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian	1 dokumen	125.125.000	

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2 di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	3 Balitbang Kab. Malang	4 Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	5 5	6 6	7 di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	8 Balitbang Kab. Malang	9 Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	10 10	11 11	12 12
3	Diseminasi Jemis, Penalar dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Balitbang Kab. Malang	Jumlah Dokumen Roadmap SIDA yang tersusun	1 dokumen	264.150.200	Diseminasi Jemis, Penalar dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Balitbang Kab. Malang	Jumlah Dokumen Roadmap SIDA yang tersusun	1 dokumen	264.150.200	
4	Diseminasi Hasil-hasil Kealangan	Balitbang Kab. Malang	1. Jumlah Urutan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dokumen	125.000.000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kealangan	Balitbang Kab. Malang	1. Jumlah Urutan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dokumen	125.000.000	
JUMLAH					8.049.428.581	JUMLAH					8.049.428.581

2.5. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

Dalam penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang, telah dilakukan pengumpulan usulan kegiatan dari SKPD dan bukan merupakan hasil dari musrenbang, sehingga untuk tabel 2.4 yaitu Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat Tahun 2022, tidak dapat disajikan. (Nihil).

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

No	Pengusul	Urutan	Usulan	Volume	Permasalahan	Alamat	Estimasi
1	2	3	4	5	6	7	8
	NIHIL		NIHIL				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang pada Tahun 2022, mengacu pada 2 (dua) urusan dari 34 (tiga puluh empat) urusan yang direncanakan pada APBD. Urusan tersebut adalah: Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dan Penelitian dan Pengembangan. Adapun program nasional yang menjadi acuan adalah: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Badan Penelitian dan Pengembangan adalah Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Perencanaan, Penerapan, Pengoperasian, dan evaluasi kebijakan yang merupakan rangkaian kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman baru dan mengembangkan Penerapan praktis, nilai, dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru dalam rangka penyelenggaraan dalam Negeri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota untuk selanjutnya disebut Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di kabupaten/kota adalah penyelenggaraan fungsi kelitbangan yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perencanaan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak

dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah.

Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Suatu ide atau gagasan untuk dapat menjadi Inovasi Daerah harus melalui tahapan yang secara rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Selain hal tersebut di atas, kita diwajibkan untuk merencanakan kegiatan yang responsif gender, sebagai syarat pemenuhan anggaran yang berbasis Pengarusutamaan Gender (PUG). PUG merupakan sebuah strategi, bukan tujuan. Strategi ini dirumuskan agar desain, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan dan program di seluruh ranah politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat terwujud. Sedangkan tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan gender. Dengan PUG maka semua program pembangunan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan, serta dengan adanya kendali dan manfaat untuk perempuan.

Di Indonesia, secara resmi PUG diadopsi menjadi strategi pembangunan bidang pemberdayaan perempuan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Dalam inpres tersebut dinyatakan tujuan PUG adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender. Dan strategi PUG ditempuh dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ruang lingkup PUG dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 meliputi:

1. Perencanaan, termasuk di dalamnya perencanaan yang responsif gender/gender budgeting;
2. Pelaksanaan;
3. Pemantauan dan Evaluasi.

Untuk mempercepat pelaksanaan PUG, juga telah dikeluarkan Surat Edaran tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender pada tanggal 1 November 2012. Surat Edaran ini dikeluarkan secara bersama-sama oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Surat edaran ini ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, para gubernur, dan para bupati/walikota.

Berdasar hal tersebut di atas, Perencanaan dan penganggaran pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang sudah sangat responsif gender, ditunjukkan dalam implementasi kegiatan teknis dari 12 (dua belas) kegiatan yang responsif gender 5 (lima) kegiatan atau 41,67 persen, yang meliputi kegiatan Pengembangan Bidang Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur, Penelitian/Kajian/Studi/Analisa Bidang Pengembangan Kawasan, Penelitian/kajian/Studi/Analisa Bidang Sosial, serta Penelitian/Kajian/Studi/Analisa Bidang Pemerintahan.

Kegiatan yang responsif gender tersebut diuraikan dalam Kerangka Acuan Kerja/*Term of Reference* pada Gender Budget Statement (GBS) pada setiap tahun anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Badan penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Badan penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan penelitian dan pengembangan guna membantu Bupati Malang dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

3.2.1 Tujuan

Berdasarkan dari isu aktual, tugas pokok dan fungsi Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan tujuan yang ingin dicapai harus selaras salah satu misi pembangunan kabupaten malang tahun 2021-2026 yaitu inovasi pelayanan publik dan kemandirian desa dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut maka diperlukan kualitas pelayanan aparatur pemerintah yang unggul melalui inovasi tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka membangun sistem layanan yang efektif, efisien, dan akuntabel sekaligus untuk mempercepat peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Misi ini juga dimaknai untuk mewujudkan pembangunan kemandirian Desa yang difokuskan pada konektifitas dan aksesibilitas layanan dalam rangka membangun Desa mandiri sebagai daya saing daerah melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan optimalisasi kawasan terpadu.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah suatu hasil yang dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun, untuk menghasilkan pedoman penyusunan rencana kegiatan, dana, lokasi penempatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien.

Dalam menjabarkan sasaran harus memiliki prinsip antara lain :

- a. Merupakan hasil yang dapat dicapai;
- b. Menantang tapi logis dan realistis;
- c. Memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pencapaian tujuan;

d. Sesuai wewenang dan tanggung jawab;

e. SMART :

(S) <i>Spesiffo</i>	: bersifat khusus/khas dan simple/ sederhana
(M) <i>Measurable</i>	: dapat diukur
(A) <i>Attalbable/Achieveble</i>	: dapat dijadikan/dikerjakan
(R) Rasional	: bersifat logis/masuk akal
(T) <i>Time Related</i>	: dimensi waktunya jelas

Berdasarkan prinsip penetapan sasaran tersebut, maka dapat dijabarkan sasaran Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang adalah Meningkatnya hasil kajian yang berhasil dipublikasikan dengan indikator sasarnya yakni :

1. Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah
2. Presentase peningkatan hasil kelitbangan dan inovasi daerah yang bermanfaat untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Badan penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan penyelenggaraan penelitian/pengkajian sebagai bahan penyusunan dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Malang dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama hasil kelitbangan yang berupa penelitian/Kajian/Studi/Analisa, Terapan dan Evaluasi Kebijakan.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Malang, pada dasarnya kegiatan Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang adalah melaksanakan "*peneliti, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan*" terhadap program pembangunan baik yang akan dilaksanakan atau yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Malang.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Malang tahun 2021-2026 yaitu "*Terwujudnya Kabupaten Malang MAKMUR*" sebagai salah satu upaya

d. Sesuai wewenang dan tanggung jawab;

e. SMART :

- (S) *Spesific* : bersifat khusus/khas dan simple/
sederhana
- (M) *Measurable* : dapat diukur
- (A) *Attainable/Achievable* : dapat dijadikan/dikerjakan
- (R) *Rasional* : bersifat logis/masuk akal
- (T) *Time Related* : dimensi waktunya jelas

Berdasarkan prinsip penetapan sasaran tersebut, maka dapat dijabarkan sasaran Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang adalah Meningkatnya hasil kajian yang berhasil dipublikasikan dengan indikator sasarnya yakni :

1. Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah
2. Presentase peningkatan hasil kelitbangan dan inovasi daerah yang bermanfaat untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Badan penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan penyelenggaraan penelitian/pengkajian sebagai bahan penyusunan dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Malang dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama hasilkelitbangan yang berupa penelitian/Kajian/Studi/Analisa, Terapan dan Evaluasi Kebijakan.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Malang, pada dasarnya kegiatan Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang adalah melaksanakan "*peneliti, pengkajian, pengembangan, perekayasa, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan*" terhadap program pembangunan baik yang akan dilaksanakan atau yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Malang.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Malang tahun 2021–2026 yaitu "*Terwujudnya Kabupaten Malang MAKMUR*" sebagai salah satu upaya

pencapaian target yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2022, maka program dan kegiatan yang dirancang oleh Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang pada tahun 2022 terdiri dari :

3.3.1 Program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;

3.3.2 Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
9. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan;
10. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
11. Pengembangan Inovasi dan Teknologi ;

3.3.3 Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ;
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD;
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;

8. Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Kelengkapannya ;
9. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
10. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
11. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
12. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;
13. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ;
14. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
15. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
16. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
17. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
18. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
19. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
20. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
21. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
23. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
24. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
25. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
26. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa;
27. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan;
28. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
29. Penelitian dan Pengembangan Pariwisata;
30. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
31. Penelitian dan Pengembangan Koprasi, Usaha Kecil Menengah;
32. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan;
33. Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika;

34. Penelitian, Pengembangan , dan Perckayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi;
35. Uji Coba Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
36. Desiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif;
37. Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-hasil Kelitbangan;

Adapun Rancangan Rencana Kerja pada tahun 2022 dan perkiraan maju tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

Table 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MALANG

Kode	Uraian/ Bidang Tercana Nomenklatur Desain Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja					Mencapai Tahun 2022					Capaian		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Kebijakan Sub Kegiatan	Kebijakan Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Sumber Dana	Target Tingkat	Target	Mencapai Dana / Page Indikator/ (Rp)			
							Program	Kebijakan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
URUSAN PENGUANG TRISAR PENGEMBANGAN																
PERSEKUTUAN DAN PENGEMBANGAN																
5 05											8,049,428,881					
5 06 01											6,545,310,381					
5 06 01 2.01											431,774,700					
5 1	2.01 1	Persentase pencapaian dukungan manajemen dan pelayanan kinerja yang berpengaruh terhadap kepuasan pelayanan (%)	Jumlah dokumen informasi yang dijadwalkan (JADWAL KADW)	Jumlah dokumen pencapaian, pengembangan dan wawasan kinerja yang dijadwalkan setiap waktu	Persentase pencapaian informasi internal dan eksternal daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kebudayaan	100%	2 dokumen	9 dokumen	100%	418,143,000	Dana Transfer Lumpu- Sum Monevi Umum		100%		0
5 5 1	2.01 5	Persentase pencapaian dukungan manajemen dan pelayanan kinerja yang berpengaruh terhadap kepuasan pelayanan (%)	Jumlah dokumen laporan kinerja LKJ (LJ) Profile Kinerja Kinerja yang dijadwalkan setiap waktu	Jumlah dokumen pencapaian, pengembangan dan wawasan kinerja yang dijadwalkan setiap waktu	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kebudayaan	100%	7 buku	9 dokumen	100%	13,571,700	Dana Transfer Lumpu- Sum Monevi Umum		100%			0

Urut	Kode	Kategori	Administarsi Keuangan Perangkat Daerah				Angka	Total	Revisi															
3	31.02	3	12.02	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Administarsi Keuangan Perangkat Daerah																								
3	31.02	3	12.02	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	31.02	3	12.02	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	31.02	3	12.02	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
No	Uraian	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja						
1	12.05	1	Pembinaan dan Pengembangan Pegawai	Persentase pemenuhan kebutuhan organisasi dan penunjang lainnya	Jumlah pegawai yang ditugaskan	Persentase pemenuhan kebutuhan organisasi dan penunjang lainnya	Semua Kab/Kota, Kota, Kecamatan, Kelurahan	100 %	47 orang	185 dokumen	100 %	401,523,000	Transfer Dana Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan organisasi dan penunjang lainnya	100 %
2	12.05	2	Pengadaan Pegawai	Persentase pemenuhan kebutuhan organisasi dan penunjang lainnya	Jumlah pegawai yang ditugaskan	Persentase pemenuhan kebutuhan organisasi dan penunjang lainnya	Semua Kab/Kota, Kota, Kecamatan, Kelurahan	100 %	47 orang	185 dokumen	100 %	10,000,000	Transfer Dana Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan organisasi dan penunjang lainnya	100 %
3	12.05	3	Pengadaan Pegawai	Persentase pemenuhan kebutuhan organisasi dan penunjang lainnya	Jumlah pegawai yang ditugaskan	Persentase pemenuhan kebutuhan organisasi dan penunjang lainnya	Semua Kab/Kota, Kota, Kecamatan, Kelurahan	100 %	45 orang	180 dokumen	100 %	185,321,000	Transfer Dana Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan organisasi dan penunjang lainnya	100 %
4	12.05	4	Pengadaan Pegawai	Persentase pemenuhan kebutuhan organisasi dan penunjang lainnya	Jumlah pegawai yang ditugaskan	Persentase pemenuhan kebutuhan organisasi dan penunjang lainnya	Semua Kab/Kota, Kota, Kecamatan, Kelurahan	100 %	47 orang	185 dokumen	100 %	164,500,000	Transfer Dana Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan organisasi dan penunjang lainnya	100 %

No	Uraian	Administrasi Umum	Perangkat Daerah	Jumlah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1	12.06	12.06	12.06	12.06	12.06	12.06	12.06	12.06	12.06	12.06
2	12.06	12.06	12.06	12.06	12.06	12.06	12.06	12.06	12.06	12.06
3	12.06	12.06	12.06	12.06	12.06	12.06	12.06	12.06	12.06	12.06
4	12.06	12.06	12.06	12.06	12.06	12.06	12.06	12.06	12.06	12.06
5	12.06	12.06	12.06	12.06	12.06	12.06	12.06	12.06	12.06	12.06

1	12.06	1	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100 %	100 %	
2	12.06	01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100 %	100 %
Pengadaan Barang Milik Daerah Peninggalan Daerah																						
3	12.07	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100 %	100 %
4	12.07	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100 %	100 %
5	12.07	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100 %	100 %

No	Kode	Tgl	Kategori	Uraian Kegiatan	Materi Pokok	Waktu	Lokasi	Pencapaian	Biaya	Pencapaian
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
1	01	2008	12.08	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kegiatan surat menyurat dan surat (buah)	1700 buah	Kab. Malang, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan	100 %	8.793,000	100 %
2	01	2008	12.08	2) Penyediaan Jasa Koneksi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan koneksi, air, listrik, / air bersih, / air minum, / air panas, / air dingin, / air panas, / air dingin, / air panas, / air dingin	17-4 bulan	Kab. Malang, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan	100 %	5.894,000	100 %
3	01	2008	12.08	4) Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	Jumlah kegiatan pelayanan urusan kantor	1714 dokumen	Kab. Malang, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan	100 %	31.656,000	100 %
Pembayaran Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
1	01	2009	12.09	1) Penyediaan Jasa Perawatan, Pemeliharaan dan Penggantian Peralatan Kantor	Jumlah kegiatan perawatan, pemeliharaan dan penggantian peralatan kantor	5 unit	Kab. Malang, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan	100 %	44.793,000	100 %

12.09	5	9	Pembelajaran/Rohabilisasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah gedung kantor yang dipeliharakan (jenis)	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semu Kecamatan, Semu Kelurahan	100 %	1 jenis	133 jenis	100 %	32.251.000	Dana Transfer Umum-Dana Abstrak Umum	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %
12.09	5	11	Pemeliharaan/Rohabilisasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipeliharakan (rumah/berkah jenis)	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semu Kecamatan, Semu Kelurahan	100 %	27 jenis	33 jenis	100 %	19.785.000	Dana Transfer Umum-Abstrak Umum	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																
1.504.118.200																
22.01	5	2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengujian Peraturan													
22.01	5	1	Penelitian, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase hasil kegiatan yang sesuai dengan strategi pembanguan Pemkab Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan 2. Jumlah Kegiatan Penelitian, Analisis, Sosialisasi dan Evaluasi Hasil Kegiatan	Jumlah Dokumen Kelibingaran yang sesuai dengan strategi pembanguan pemerintah Kabupaten Malang	Persentase peningkatan hasil Kelibingaran dan inovasi Daerah yang bermanfaat untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah	Semus Kab./Kota, Semu Kecamatan, Semu Kelurahan	81 %	1 Laporan	3 Dokumen	81 %	93.929.000	Dana Transfer Umum-Abstrak Umum	Persentase hasil kegiatan Kelibingaran yang sesuai dengan strategi pembanguan Pemkab Malang	81 %
22.01	5	1	Penelitian, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Daerah	Persentase hasil kegiatan yang sesuai dengan strategi pembanguan Pemkab Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan 2. Jumlah Kegiatan Penelitian, Analisis, Sosialisasi dan Evaluasi Hasil Kegiatan	Jumlah Dokumen Kelibingaran yang sesuai dengan strategi pembanguan pemerintah Kabupaten Malang	Persentase peningkatan hasil Kelibingaran dan inovasi Daerah yang bermanfaat untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah	Kab. Malang, Semu Kecamatan, Semu Kelurahan	81 %	1 Dokumen	3 Dokumen	81 %	94.244.000	Dana Transfer Umum-Abstrak Umum	Persentase hasil kegiatan Kelibingaran yang sesuai dengan strategi pembanguan Pemkab Malang	81 %

20	20.01	13) Pengeloaan Dana Kelibngan dan Peraturan	Perentase hasil kegiatan kelibngan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan	Jumlah kelibngan yang sesuai dengan strategi pembangunan pemerintah kabupaten Malang	Presentase hasil kegiatan kelibngan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	81 %	1 dokumen	81 %	94,038,000	Data Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perentase hasil kegiatan kelibngan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	81 %
21	21.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependidikan											
22	22.02	3) Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Perentase hasil kegiatan kelibngan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan	Jumlah kelibngan yang sesuai dengan strategi pembangunan pemerintah kabupaten Malang	Perentase hasil kegiatan kelibngan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	81 %	1 dokumen	81 %	100,100,000	Data Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perentase hasil kegiatan kelibngan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	81 %
23	23.02	5) Penelitian dan Pengembangan Perencanaan	Perentase hasil kegiatan kelibngan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan	Jumlah kelibngan yang sesuai dengan strategi pembangunan pemerintah kabupaten Malang	Perentase hasil kegiatan kelibngan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	81 %	1 dokumen	81 %	100,100,000	Data Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perentase hasil kegiatan kelibngan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	81 %

No	Kode	Uraian	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori
22.02	22.02	Pembelian dan Pengembangan Perangkat Keras	Pembelian dan Pengembangan Perangkat Keras	Pembelian dan Pengembangan Perangkat Keras	Pembelian dan Pengembangan Perangkat Keras	Pembelian dan Pengembangan Perangkat Keras	Pembelian dan Pengembangan Perangkat Keras	Pembelian dan Pengembangan Perangkat Keras
22.03	22.03	Pembelian dan Pengembangan Perangkat Lunak	Pembelian dan Pengembangan Perangkat Lunak	Pembelian dan Pengembangan Perangkat Lunak	Pembelian dan Pengembangan Perangkat Lunak	Pembelian dan Pengembangan Perangkat Lunak	Pembelian dan Pengembangan Perangkat Lunak	Pembelian dan Pengembangan Perangkat Lunak
22.03	22.03	Pembelian dan Pengembangan Perangkat Lunak	Pembelian dan Pengembangan Perangkat Lunak	Pembelian dan Pengembangan Perangkat Lunak	Pembelian dan Pengembangan Perangkat Lunak	Pembelian dan Pengembangan Perangkat Lunak	Pembelian dan Pengembangan Perangkat Lunak	Pembelian dan Pengembangan Perangkat Lunak
22.03	22.03	Pembelian dan Pengembangan Perangkat Lunak	Pembelian dan Pengembangan Perangkat Lunak	Pembelian dan Pengembangan Perangkat Lunak	Pembelian dan Pengembangan Perangkat Lunak	Pembelian dan Pengembangan Perangkat Lunak	Pembelian dan Pengembangan Perangkat Lunak	Pembelian dan Pengembangan Perangkat Lunak

No	Uraian	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan
1	Penelitian dan Pengembangan dan Persepsi siswa di Bidang Teknologi dan Informatika	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan
2	20.04	20.04	20.04	20.04	20.04	20.04	20.04	20.04	20.04	20.04	20.04
3	20.04	20.04	20.04	20.04	20.04	20.04	20.04	20.04	20.04	20.04	20.04
4	20.04	20.04	20.04	20.04	20.04	20.04	20.04	20.04	20.04	20.04	20.04

3	32	04	3) Deskripsi dari Jenis, Prinsip dan Metode Penyelidikan dan Pengembangan serta Pembentukan Organisasi yang Berbasis Inovatif	Penerbitan hasil kegiatan penelitian yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	Jumlah dokumen kolaborasi yang sesuai dengan strategi pembangunan pemerintah Kabupaten Malang	penyusunan kebijakan di bidang penelitian dan inovasi yang bermutu untuk mengoptimalkan kinerja birokrasi pemerintah	Kab. Malang, Kota Batu, Kecamatan, Kabupaten Karanganyar	81 %	1 dokumen	4 dokumen	81 %	255.130.200	Dana Transfer DIPA Dinas Kabupaten Malang	Penerbitan hasil kegiatan penelitian yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang
3	32	04	4) Soal jawab dan Dimensi Hasil Hasil Kolaborasi	Penerbitan hasil kegiatan penelitian yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	Jumlah dokumen kolaborasi yang sesuai dengan strategi pembangunan pemerintah Kabupaten Malang	penyusunan kebijakan di bidang penelitian dan inovasi yang bermutu untuk mengoptimalkan kinerja birokrasi pemerintah	Kab. Malang, Kota Batu, Kecamatan, Kabupaten Karanganyar	81 %	1 dokumen	4 dokumen	81 %	125.000.000	Dana Transfer DIPA Dinas Kabupaten Malang	Penerbitan hasil kegiatan penelitian yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang
TOTAL											8.049.428.581			

DAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Badan penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan penyelenggaraan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan dalam penyusunan dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Malang dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk yang berupa hasil penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan sebagaimana diatur pada pasal 4 huruf a, Permendagri nomor 17 tahun 2016.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Malang, kegiatan Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang adalah melaksanakan "*penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan*" terhadap program dan kegiatan guna mendukung terwujudnya sasaran RPJMD Kabupaten Malang.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Malang tahun 2021-2026 yaitu "Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika.

Program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;

9. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan;
10. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
11. Pengembangan Inovasi Teknologi;

Sub Kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ;
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD;
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
8. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya ;
9. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
10. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan;
11. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
12. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;
13. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ;
14. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
15. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
16. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
17. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
18. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
19. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
20. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
21. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
23. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
24. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

25. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
26. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa;
27. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan;
28. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
29. Penelitian dan Pengembangan Pariwisata;
30. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
31. Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Menengah;
32. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan;
33. Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika;
34. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi;
35. Uji Coba Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
36. Desiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif;
37. Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-hasil Kelitbangan;

Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

12.02	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemeriksaan pemenuhan kewajiban manajemen pemenuhan dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Pemenuhan Penemuan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Sebagian Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	33 orang	51 dokumen	100 %	3.754.338,333	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
12.02	3	3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemeriksaan pemenuhan kewajiban manajemen pemenuhan dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah pejabat kepala administratif (PJ)	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Pemenuhan Penemuan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	21.215	51 dokumen	100 %	882.206,344	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
12.02	3	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pemeriksaan pemenuhan kewajiban manajemen pemenuhan dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Pemenuhan Penemuan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 buku	51 dokumen	100 %	17.199.600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
12.02	3	3	Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestrian dan SKPD	Pemeriksaan pemenuhan kewajiban manajemen pemenuhan dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan dan semester (Duk-1 dan Duk-2) (Duk-3)	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Pemenuhan Penemuan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 buku	51 dokumen	100 %	2.434.000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
12.02	3	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										401.521.000	

4	5	12.03	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Pemerataan pemenuhan dukungan manajemen, pembinaan dan pemenuhan kinerja pegawai daerah, serta tahun (%)	jumlah sarana dan prasarana pegawai (orang)	jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diinput secara akurat, sistem dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	47 orang	186 dokumen	100 %	22.400.000	Daerah Transfer Kelembagaan
5	5	12.05	2	Pengaduan Pelayanan Dinas Desa, Akibat Kelangkaannya	Pemerataan pemenuhan dukungan manajemen dan pemenuhan kinerja pegawai daerah dalam satu tahun (%)	jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan dinas (orang)	jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diinput secara akurat, sistem dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	47 orang	186 dokumen	100 %	18.400.000	Daerah Transfer Kelembagaan
5	5	12.03	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berhambatan Pagar dan Pungsi	Pemerataan pemenuhan dukungan manajemen dan pemenuhan kinerja pegawai daerah dalam satu tahun (%)	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diinput secara akurat, sistem dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	45 orang	186 dokumen	100 %	185.321.000	Daerah Transfer Kelembagaan
5	5	12.03	11	Diseminasi Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemerataan pemenuhan dukungan manajemen dan pemenuhan kinerja pegawai daerah dalam satu tahun (%)	jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan	jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diinput secara akurat, sistem dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	47 orang	186 dokumen	100 %	104.250.000	Daerah Transfer Kelembagaan
6	6	12.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										483.638.000	

5	12.06	1	4	Penyediaan Sampahan Instansi (LRTK), Persepsi di Bangkalan Kantor	Pemeriksaan pemenuhan dukungan anggaran yang terdapat di dalam satu tahun (%)	Jumlah penyediaan Sampahan atau limbah dan elektronik	Jumlah dokumen administrasi umum yang dibuat sesuai aturan dan tepat waktu	Pemenuhan Layanan Perangko Daerah	Kab. Malang, Kecamatan, Desa Karangrejo	100 %	9 jenis	1089 jenis	100 %	7.240.000,00	Dana Transfer Umum Dana Abadi Urusan Umum
5	12.06	1	4	Penyediaan Perbaikan dan Perawatan Senter	Pemenuhan dukungan manajemen pemungutan dan perangko daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum yang dibuat sesuai aturan dan tepat waktu	Pemenuhan Layanan Internal Perangko Daerah	Kab. Malang, Kecamatan, Desa Karangrejo	100 %	10 jenis	1089 jenis	100 %	61.221,000,00	Dana Transfer Umum-Dana Abadi Urusan Umum
5	12.06	1	4	Penyediaan Ruang Cetak dan Pengondaan	Pemenuhan dukungan manajemen pemungutan dan perangko daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah barang habis yang disediakan (jenis)	Jumlah dokumen administrasi umum yang dibuat sesuai aturan dan tepat waktu	Pemenuhan Layanan Internal Perangko Daerah	Kab. Malang, Kecamatan, Desa Karangrejo	100 %	7 jenis	1089 jenis	100 %	77.651,000,00	Dana Transfer Umum-Dana Abadi Urusan Umum
5	12.06	1	4	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	Pemenuhan dukungan manajemen pemungutan dan perangko daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah bahan bacaan dan peruntukan perundang-undangan yang disediakan (jenis)	Jumlah dokumen administrasi umum yang dibuat sesuai aturan dan tepat waktu	Pemenuhan Layanan Internal Perangko Daerah	Kab. Malang, Kecamatan, Desa Karangrejo	100 %	3 jenis	1089 jenis	100 %	7.327,000,00	Dana Transfer Umum-Dana Abadi Urusan Umum
5	12.06	1	4	Pemenuhan Kurangan Teori	Pemenuhan dukungan manajemen pemungutan dan perangko daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah dokumen dan peruntukan perundang-undangan yang disediakan (HOK)	Jumlah dokumen administrasi umum yang dibuat sesuai aturan dan tepat waktu	Pemenuhan Layanan Internal Perangko Daerah	Kab. Malang, Kecamatan, Desa Karangrejo	100 %	750 HOK	1089 jenis	100 %	66.687,000,00	Dana Transfer Umum-Dana Abadi Urusan Umum

4	12.06	1) Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan di Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan dukungan manajemen per Kantor dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah penyediaan komponen alat listrik dan elektronik	Jumlah dokumen administrasi umum yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Kota Kecamatan, Semua Kecamatan Kelurahan	100 %	9 jenis	1089 jenis 100 %	7.540.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	12.06	2) Penyediaan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan dukungan manajemen dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Kota Kecamatan, Semua Kecamatan Kelurahan	100 %	80 jenis	1089 jenis 100 %	61.221.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	12.06	3) Penyediaan Bausang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah bausang cetak yang disediakan (jenis)	Jumlah dokumen administrasi umum yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Kota Kecamatan, Semua Kecamatan Kelurahan	100 %	7 jenis	1089 jenis 100 %	77.651.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	12.06	4) Penyediaan Bahan Baku dan Peruntak Perundang-undangan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah bahan baku dan peruntak perundang-undangan yang disediakan (jenis)	Jumlah dokumen administrasi umum yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Kota Kecamatan, Semua Kecamatan Kelurahan	100 %	3 jenis	1089 jenis 100 %	7.327.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	12.06	5) Swalibel Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan dukungan manajemen dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah malikan dan minuman harian pegawai, rapat, dan tamu yang disediakan (RDK)	Jumlah dokumen administrasi umum yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Kota Kecamatan, Semua Kecamatan Kelurahan	100 %	750 RDK	1089 jenis 100 %	66.637.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Tgl	12.06	12.06	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Kemitraan (SKRT)	Perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan peninjauan kembali program kerja di tingkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah pegawai termasuk penggunaan dana ke luar / ke dalam daerah (HOK)	jumlah dokumen administrasi surat yang ditinjau sesuai aturan dan tepat waktu	Penelitian, pemantauan, layanan internal, pengantar Daerah	100 %	340 HOK	1000 jenis	100 %	Dana Transfer Umum, Dana Abdi Masyarakat Umum		
5	5	12.07	Pengadaan Negeri MILIK Daerah Pemajang Uraian Pemertintah Daerah												
5	5	12.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perencanaan, pembelian, dukungan, manajemen, pelaksanaan dan peninjauan kembali program kerja di tingkat daerah dalam satu tahun (%)	jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	jumlah barang milik Daerah yang diadakan sesuai aturan yang berlaku	Perencanaan, pembelian, layanan internal, pengantar Daerah	100 %	1 unit	16 unit	100 %	539.777.000 Dana Transfer Umum, Dana Abdi Masyarakat Umum		
5	5	12.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Perencanaan, pembelian, dukungan, manajemen, pelaksanaan dan peninjauan kembali program kerja di tingkat daerah dalam satu tahun (%)	jumlah sarana prasarana gedung kantor	jumlah barang milik Daerah yang diadakan sesuai aturan yang berlaku	Perencanaan, pembelian, layanan internal, pengantar Daerah	100 %	15 unit	16 unit	100 %	100.000.000		
8	01	2.08	Penyediaan Jasa Pemajang Uraian Pemertintah Daerah												
5	5	12.08	1	Penyediaan Jasa Garur Mewah	Perencanaan, pelaksanaan, manajemen, pelaksanaan dan peninjauan kembali program kerja di tingkat daerah dalam satu tahun (%)	jumlah registrasi surat masuk dan keluar (budi)	jumlah dokumen pengujian jasa penjangkauan yang ditinjau sesuai aturan dan tepat waktu	Perencanaan, pembelian, layanan internal, pengantar Daerah	100 %	1700 buah	1714 dokumen	100 %	39.620.000 Dana Transfer Umum, Dana Abdi Masyarakat Umum		

4	12.08	2) Perencanaan Jasa Konsultansi, Studi Kelayakan, Desain, dan Konstruksi	Perencanaan, pemrosesan, pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan dan peninjauan kembali serta layanan (N)	jumlah penyediaan perahu motor, / perahu, mobilisasi kapal dan insentif (tawar)	Uraian pekerjaan perahu motor yang akan dibangun dan biaya konstruksi	Penelitian, Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Peninjauan Kembali	100 %	12 bulan	1714	100 %	1.000.000.000	1.000.000.000
5	12.08	4) Perencanaan, Jasa Pelaksanaan, dan Pengawasan	Perencanaan pelaksanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeriksaan serta layanan (N)	Uraian pekerjaan	Uraian pekerjaan jasa perahu motor yang akan dibangun dan biaya konstruksi	Penelitian, Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Peninjauan Kembali	100 %	12 bulan	1714	100 %	1.000.000.000	1.000.000.000
5	12.09	1) Perencanaan, Jasa Perencanaan, Studi Kelayakan, Desain, dan Konstruksi	Perencanaan, pemrosesan, pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan dan peninjauan kembali serta layanan (N)	jumlah pembangunan perahu motor yang akan dibangun dan biaya konstruksi	Uraian pekerjaan perahu motor yang akan dibangun dan biaya konstruksi	Penelitian, Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Peninjauan Kembali	100 %	12 bulan	1714	100 %	1.000.000.000	1.000.000.000

A. JABAT PUSAT (PUSAT) - KANTOR DAERAH (KANTOR DAERAH) - KANTOR KAWILAYAH (KANTOR KAWILAYAH)

No	Tahun	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori
3	14.09	Pembelajaran/hibrida Layanan Kecerdasan Artificial	Peningkatan Keterampilan Kelembagaan dan peningkatan kemampuan dalam mempromosikan kegiatan daerah dalam sistem daerah	Jumlah gedung baru yang dipelihara (unit)	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara
4	14.09	Pembelajaran/hibrida Layanan Kecerdasan Artificial	Peningkatan Keterampilan Kelembagaan dan peningkatan kemampuan dalam mempromosikan kegiatan daerah dalam sistem daerah	Jumlah gedung baru yang dipelihara (unit)	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara
				100%	100%	100%
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
5	20.01	Pembelajaran/hibrida Layanan Kecerdasan Artificial	Peningkatan Keterampilan Kelembagaan dan peningkatan kemampuan dalam mempromosikan kegiatan daerah dalam sistem daerah	Jumlah gedung baru yang dipelihara (unit)	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara
				100%	100%	100%
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
6	20.01	Pembelajaran/hibrida Layanan Kecerdasan Artificial	Peningkatan Keterampilan Kelembagaan dan peningkatan kemampuan dalam mempromosikan kegiatan daerah dalam sistem daerah	Jumlah gedung baru yang dipelihara (unit)	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara
				100%	100%	100%
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
7	20.01	Pembelajaran/hibrida Layanan Kecerdasan Artificial	Peningkatan Keterampilan Kelembagaan dan peningkatan kemampuan dalam mempromosikan kegiatan daerah dalam sistem daerah	Jumlah gedung baru yang dipelihara (unit)	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara
				100%	100%	100%
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
8	20.01	Pembelajaran/hibrida Layanan Kecerdasan Artificial	Peningkatan Keterampilan Kelembagaan dan peningkatan kemampuan dalam mempromosikan kegiatan daerah dalam sistem daerah	Jumlah gedung baru yang dipelihara (unit)	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara
				100%	100%	100%
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
9	20.01	Pembelajaran/hibrida Layanan Kecerdasan Artificial	Peningkatan Keterampilan Kelembagaan dan peningkatan kemampuan dalam mempromosikan kegiatan daerah dalam sistem daerah	Jumlah gedung baru yang dipelihara (unit)	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara
				100%	100%	100%
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				

No	Kode	Kategori	Uraian Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Total			
5	22.01	5	Penelitian, Pelaksanaan dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Control Daerah	Persentase hasil kegiatan penelitian yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	1. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan 2. Jumlah Kegiatan Penelitian, Sosialisasi dan Pelatihan Hasil Kegiatan	Jumlah dokumen kegiatan yang sesuai dengan strategi pembangunan Kabupaten Malang	Persentase kegiatan penelitian hasil penelitian, sosialisasi, dan inovasi yang dilakukan	81 %	1 Laporan	3 dokumen 81 %	91.225.000,00	Transfer Lumajang Arbab Cemas
5	22.01	7	Konfirmasi, Pelaksanaan dan Pembinaan dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Bidang Penyelenggaraan Desa	Persentase hasil kegiatan pembinaan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	3. Jumlah Dokumen hasil kegiatan 2. Jumlah kegiatan pelatihan, sosialisasi dan pelatihan hasil kegiatan	Jumlah dokumen pembinaan yang sesuai dengan strategi pembangunan Kabupaten Malang	Persentase kegiatan pembinaan yang sesuai dengan strategi pembangunan Kabupaten Malang	81 %	1 Dokumen	3 dokumen 81 %	94.244.000,00	Transfer Lumajang Arbab Cemas
5	22.01	12	Pengelolaan Data Kelengkapan dan Perawatan	Persentase hasil kegiatan kelengkapan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	Jumlah dokumen referensi, pendataan dan pengembangan	Jumlah dokumen kelengkapan yang sesuai dengan strategi pembangunan Kabupaten Malang	Persentase kegiatan referensi, pendataan dan pengembangan	81 %	1 dokumen	3 dokumen 81 %	94.038.000,00	Transfer Lumajang Arbab Cemas
5	22.02		Pasokan dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependidikan								300.300,000	

2	24.02	3	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Perencanaan hasil kegiatan penelitian yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	1. Jumlah Usulan Judul Penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Penelitian/Kajian/ Studi/ Analisis 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jumlah Hasil Kegiatan 5. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	Jumlah dokumen penelitian yang sesuai dengan strategi pembangunan pemerintah Kabupaten Malang	81 %	1 dokumen	3 dokumen	81 %	100,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	22.02	5	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Perencanaan hasil kegiatan penelitian yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	1. Jumlah Usulan Judul Penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Penelitian/Kajian/ Studi/ Analisis 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jumlah Hasil Kegiatan 5. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	Jumlah dokumen penelitian yang sesuai dengan strategi pembangunan pemerintah Kabupaten Malang	81 %	1 dokumen	3 dokumen	81 %	100,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	22.02	6	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Perencanaan hasil kegiatan penelitian yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	1. Jumlah Usulan Judul Penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Penelitian/Kajian/ Studi/ Analisis 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jumlah Hasil Kegiatan 5. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	Jumlah dokumen penelitian yang sesuai dengan strategi pembangunan pemerintah Kabupaten Malang	81 %	1 dokumen	3 dokumen	81 %	100,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	22.03	6	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Perencanaan hasil kegiatan penelitian yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	1. Jumlah Usulan Judul Penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Penelitian/Kajian/ Studi/ Analisis 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jumlah Hasil Kegiatan 5. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	Jumlah dokumen penelitian yang sesuai dengan strategi pembangunan pemerintah Kabupaten Malang	81 %	1 dokumen	3 dokumen	81 %	262,207,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kategori	Indikator	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian
3	Pencapaian dan Pengembangan	Pencapaian dan Pengembangan	Pencapaian dan Pengembangan	Pencapaian dan Pengembangan	Pencapaian dan Pengembangan	Pencapaian dan Pengembangan	Pencapaian dan Pengembangan	Pencapaian dan Pengembangan	Pencapaian dan Pengembangan
4	Pencapaian dan Pengembangan	Pencapaian dan Pengembangan	Pencapaian dan Pengembangan	Pencapaian dan Pengembangan	Pencapaian dan Pengembangan	Pencapaian dan Pengembangan	Pencapaian dan Pengembangan	Pencapaian dan Pengembangan	Pencapaian dan Pengembangan
5	Pencapaian dan Pengembangan	Pencapaian dan Pengembangan	Pencapaian dan Pengembangan	Pencapaian dan Pengembangan	Pencapaian dan Pengembangan	Pencapaian dan Pengembangan	Pencapaian dan Pengembangan	Pencapaian dan Pengembangan	Pencapaian dan Pengembangan
6	Pencapaian dan Pengembangan	Pencapaian dan Pengembangan	Pencapaian dan Pengembangan	Pencapaian dan Pengembangan	Pencapaian dan Pengembangan	Pencapaian dan Pengembangan	Pencapaian dan Pengembangan	Pencapaian dan Pengembangan	Pencapaian dan Pengembangan

20	1	Pembinaan dan Pengembangan Keputusian, Kerja Sama dan Sinergisitas	Persentase hasil kegiatan kolaborasi yang sesuai dengan strategi pembangunan Kabupaten Malang	1. Jumlah Output/Jumlah Penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Kolaborasi/Kajian/Studi/Analisis 3. Jumlah Model Terapan 4. Jumlah Sasabah, Jumlah Hasil Kegiatan 5. Jumlah Sasabah, Jumlah Hasil Kegiatan	Jumlah dokumen kolaborasi yang sesuai dengan strategi pembangunan pemerintah Kabupaten Malang	persentase peningkatan jumlah kolaborasi dan inovasi daerah yang dilaksanakan secara fisik dan kerjasama pemerintah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 %	1 dokumen	1 dokumen	81 %	1 dokumen	93.248.000 Dana Transfer Pemda-Dana Monev dan
21	2	Pendidikan dan Pengembangan Potensi, Penguatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase hasil kegiatan kolaborasi yang sesuai dengan strategi pembangunan Kabupaten Malang	1. Jumlah Output/Jumlah Penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Kolaborasi/Kajian/Studi/Analisis 3. Jumlah Model Terapan 4. Jumlah Sasabah, Jumlah Hasil Kegiatan 5. Jumlah Sasabah, Jumlah Hasil Kegiatan	Jumlah dokumen kolaborasi yang sesuai dengan strategi pembangunan pemerintah Kabupaten Malang	persentase peningkatan jumlah kolaborasi dan inovasi daerah yang dilaksanakan secara fisik dan kerjasama pemerintah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 %	1 dokumen	1 dokumen	81 %	1 dokumen	94.073.000 Dana Transfer Pemda-Dana Monev dan
22	3	Pendidikan dan Pengembangan Potensi, Penguatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase hasil kegiatan kolaborasi yang sesuai dengan strategi pembangunan Kabupaten Malang	1. Jumlah Output/Jumlah Penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Kolaborasi/Kajian/Studi/Analisis 3. Jumlah Model Terapan 4. Jumlah Sasabah, Jumlah Hasil Kegiatan 5. Jumlah Sasabah, Jumlah Hasil Kegiatan	Jumlah dokumen kolaborasi yang sesuai dengan strategi pembangunan pemerintah Kabupaten Malang	persentase peningkatan jumlah kolaborasi dan inovasi daerah yang dilaksanakan secara fisik dan kerjasama pemerintah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 %	1 dokumen	1 dokumen	81 %	1 dokumen	94.894.000 Dana Transfer Pemda-Dana Monev dan
23	4	Pengembangan dan Penguatan Potensi, Penguatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase hasil kegiatan kolaborasi yang sesuai dengan strategi pembangunan Kabupaten Malang	1. Jumlah Output/Jumlah Penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Kolaborasi/Kajian/Studi/Analisis 3. Jumlah Model Terapan 4. Jumlah Sasabah, Jumlah Hasil Kegiatan 5. Jumlah Sasabah, Jumlah Hasil Kegiatan	Jumlah dokumen kolaborasi yang sesuai dengan strategi pembangunan pemerintah Kabupaten Malang	persentase peningkatan jumlah kolaborasi dan inovasi daerah yang dilaksanakan secara fisik dan kerjasama pemerintah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 %	1 dokumen	1 dokumen	81 %	1 dokumen	639.400.000

2	2	22.04	1. Penelitian, Pengembangan, dan Peningkatan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Pemertaaan hasil kegiatan kolaborasi yang sesuai dengan strategi pembangunan pembaharuan Malang	1. Jumlah Usulan Juri/1. Jumlah 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/1. Jumlah Modul/2. Jumlah Modul/3. Jumlah Hasil Kegiatan/4. Jumlah Hasil Kajian/5. Jumlah Hasil Kegiatan	Jumlah dokumen kolaborasi yang sesuai dengan strategi pembangunan pembaharuan Malang	1. Kab. Malang, 2. Semua Kecamatan, 3. Semua Kelurahan	1. 1 %	1 dokumen	4 dokumen/1 %	125.125.000 Dana Transfer Umum-Dana Malika Umum	
3	3	22.04	2. Uji Coba dan Penerapan Teknologi/Model Aplikasi dan Peran di Bidang 2. Real Inovasi dan Peningkatan Teknologi	Pemertaaan hasil kegiatan kolaborasi yang sesuai dengan strategi pembangunan pembaharuan Malang	1. Jumlah Usulan Juri/1. Jumlah 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/1. Jumlah Modul/2. Jumlah Modul/3. Jumlah Hasil Kegiatan/4. Jumlah Hasil Kajian/5. Jumlah Hasil Kegiatan	Jumlah dokumen kolaborasi yang sesuai dengan strategi pembangunan pembaharuan Malang	1. Kab. Malang, 2. Semua Kecamatan, 3. Semua Kelurahan	1. 1 %	1 dokumen	4 dokumen/1 %	125.125.000 Dana Transfer Umum-Dana Malika Umum	
5	5	22.04	3. Inovasi, Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Inovatif	Pemertaaan hasil kegiatan kolaborasi yang sesuai dengan strategi pembangunan pembaharuan Malang	Jumlah Dokumen Rancangan RDA yang terakumulasi	Jumlah dokumen kolaborasi yang sesuai dengan strategi pembangunan pembaharuan Malang	1. Kab. Malang, 2. Semua Kecamatan, 3. Semua Kelurahan	1. 1 %	1 dokumen	4 dokumen/1 %	25.125.000 Dana Transfer Umum-Dana Malika Umum	

5	12.0	5	12.0	1	100 %	51	100 %	3,754,236,333	Dana Transfer	25 %	938,584,583	25 %	938,584,583	25 %	938,584,583	25 %	938,584,583
5	12.0	5	12.0	1	100 %	51	100 %	652,206,240	Dana Transfer	25 %	170,551,587	25 %	170,551,587	25 %	170,551,587	25 %	170,551,587
5	12.0	5	12.0	1	100 %	51	100 %	17,199,000	Dana Transfer	25 %	4,299,750	25 %	4,299,750	25 %	4,299,750	25 %	4,299,750
5	12.0	5	12.0	1	100 %	51	100 %	2,834,000	Dana Transfer	25 %	708,500	25 %	708,500	25 %	708,500	25 %	708,500
5	12.0	5	12.0	1	100 %	51	100 %	401,821,000		25 %	100,500	25 %	100,500	25 %	100,500	25 %	100,500

REKAPITULASI RENCANA KEGIATAN KEKORPORATIFAN DAN KEMERDEKAAN USAHA

5	12.0	5	Peningkatan Kualitas dan Prestasi Kerja Pegawai	Penelitian, pemenuhan kebutuhan, manajemen, pembinaan, dan pemantauan kinerja pegawai daerah tahun 2014	Jumlah dan persentase pegawai (orang)	Jumlah dan persentase pelaksanaan administrasi yang diselesaikan sesuai standar dan tepat waktu	Penelitian, Penelitian Layanan Peringkat Daerah	Sumbu Kab/Kota, Sumbu Kecamatan, Sumbu Kelurahan	100 %	47 orang	186 dokumen	100 %	42.000.000	Dana Transfer	25 %	8.225.000 %	25 %	8.225.000 %	25 %	8.225.000 %
5	12.0	5	Penyediaan Bahan Baku dan Bahan Mentah Kelengkapan	Penyediaan pemenuhan kebutuhan manajemen, pembinaan, dan pemantauan kinerja pegawai daerah tahun 2014	Jumlah pegawai yang disediakan (orang)	Jumlah dan persentase administrasi yang diselesaikan sesuai standar dan tepat waktu	Penelitian, Penelitian Layanan Peringkat Daerah	Sumbu Kab/Kota, Sumbu Kecamatan, Sumbu Kelurahan	100 %	47 orang	186 dokumen	100 %	15.500.000	Dana Transfer	25 %	1.700.000 %	25 %	1.700.000 %	25 %	1.700.000 %
5	12.0	5	Peningkatan dan Peningkatan Kualitas Kerja Pegawai	Penelitian, pemenuhan kebutuhan, manajemen, pembinaan, dan pemantauan kinerja pegawai daerah tahun 2014	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Jumlah dan persentase pelaksanaan administrasi yang diselesaikan sesuai standar dan tepat waktu	Penelitian, Penelitian Layanan Peringkat Daerah	Sumbu Kab/Kota, Sumbu Kecamatan, Sumbu Kelurahan	100 %	47 orang	186 dokumen	100 %	185.321.000	Dana Transfer	25 %	46.330.250 %	25 %	46.330.250 %	25 %	46.330.250 %
5	12.0	5	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Kerja Pegawai	Penelitian, pemenuhan kebutuhan, manajemen, pembinaan, dan pemantauan kinerja pegawai daerah tahun 2014	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Jumlah dan persentase pelaksanaan administrasi yang diselesaikan sesuai standar dan tepat waktu	Penelitian, Penelitian Layanan Peringkat Daerah	Sumbu Kab/Kota, Sumbu Kecamatan, Sumbu Kelurahan	100 %	47 orang	186 dokumen	100 %	154.500.000	Dana Transfer	25 %	41.125.000 %	25 %	41.125.000 %	25 %	41.125.000 %
5	12.0	5	Administrasi Umum Peringkat Daerah										452.628.000							

No	Indikator	Penjelasan	Unit Ukur	Skala	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.2.1.1.1.1	12.2.1.1.1.1.1	12.2.1.1.1.1.1.1	12.2.1.1.1.1.1.1.1	12.2.1.1.1.1.1.1.1.1	12.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1	12.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	12.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	12.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	12.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	12.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	12.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
3	12.3	12.3.1	12.3.1.1	12.3.1.1.1	12.3.1.1.1.1	12.3.1.1.1.1.1	12.3.1.1.1.1.1.1	12.3.1.1.1.1.1.1.1	12.3.1.1.1.1.1.1.1.1	12.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1	12.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	12.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	12.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	12.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	12.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	12.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.1.7	1.1.8	1.1.9	1.1.10	1.1.11	1.1.12	1.1.13	1.1.14

3	22	3	Penelitian dan Pengembangan Keperawatan, Usaha Kecil dan Menengah.	Penelitian dan Pengembangan Keperawatan, Usaha Kecil dan Menengah.	Perencanaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah.	Penelitian dan Pengembangan Keperawatan, Usaha Kecil dan Menengah.	Penelitian dan Pengembangan Keperawatan, Usaha Kecil dan Menengah.	1. Jumlah Judul Penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Riset (Kajian Penelitian/Keperawatan/Study/Abstrak) 3. Jumlah Subjutan Modul Terapan Malang 4. Jumlah Naskah Jumlah Rujukan 5. Jumlah Hasil Rujukan 6. Jumlah Rujukan 7. Jumlah Rujukan 8. Jumlah Rujukan 9. Jumlah Rujukan 10. Jumlah Rujukan	Jumlah dokumen penelitian yang sesuai dengan strategi pembelajaran dan penelitian.	Jumlah dokumen penelitian yang sesuai dengan strategi pembelajaran dan penelitian.	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 %	81 %	93.240.000 Dana Transafe Umum Dana Alokasi Umum	25 % 23.312.000	25 % 23.312.000	25 % 23.312.000	25 % 23.312.000	25 % 23.312.000	25 % 23.312.000	25 % 23.312.000	25 % 23.312.000	
4	22	3	Penelitian dan Pengembangan Perawatan, Usaha Kecil dan Menengah.	Penelitian dan Pengembangan Perawatan, Usaha Kecil dan Menengah.	Perencanaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah.	Penelitian dan Pengembangan Perawatan, Usaha Kecil dan Menengah.	Penelitian dan Pengembangan Perawatan, Usaha Kecil dan Menengah.	1. Jumlah Judul Penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Riset (Kajian Penelitian/Keperawatan/Study/Abstrak) 3. Jumlah Subjutan Modul Terapan Malang 4. Jumlah Naskah Jumlah Rujukan 5. Jumlah Hasil Rujukan 6. Jumlah Rujukan 7. Jumlah Rujukan 8. Jumlah Rujukan 9. Jumlah Rujukan 10. Jumlah Rujukan	Jumlah dokumen penelitian yang sesuai dengan strategi pembelajaran dan penelitian.	Jumlah dokumen penelitian yang sesuai dengan strategi pembelajaran dan penelitian.	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 %	81 %	94.075.000 Dana Transafe Umum Dana Alokasi Umum	25 % 23.518.750	25 % 23.518.750	25 % 23.518.750	25 % 23.518.750	25 % 23.518.750	25 % 23.518.750	25 % 23.518.750	25 % 23.518.750	
5	22	3	Penelitian dan Pengembangan Perawatan, Usaha Kecil dan Menengah.	Penelitian dan Pengembangan Perawatan, Usaha Kecil dan Menengah.	Perencanaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah.	Penelitian dan Pengembangan Perawatan, Usaha Kecil dan Menengah.	Penelitian dan Pengembangan Perawatan, Usaha Kecil dan Menengah.	1. Jumlah Judul Penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Riset (Kajian Penelitian/Keperawatan/Study/Abstrak) 3. Jumlah Subjutan Modul Terapan Malang 4. Jumlah Naskah Jumlah Rujukan 5. Jumlah Hasil Rujukan 6. Jumlah Rujukan 7. Jumlah Rujukan 8. Jumlah Rujukan 9. Jumlah Rujukan 10. Jumlah Rujukan	Jumlah dokumen penelitian yang sesuai dengan strategi pembelajaran dan penelitian.	Jumlah dokumen penelitian yang sesuai dengan strategi pembelajaran dan penelitian.	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 %	81 %	94.894.000 Dana Transafe Umum Dana Alokasi Umum	25 % 23.721.000	25 % 23.721.000	25 % 23.721.000	25 % 23.721.000	25 % 23.721.000	25 % 23.721.000	25 % 23.721.000	25 % 23.721.000	25 % 23.721.000
6	22	4	Program Riset dan Teknologi	Program Riset dan Teknologi	Program Riset dan Teknologi	Program Riset dan Teknologi	Program Riset dan Teknologi	Program Riset dan Teknologi	Program Riset dan Teknologi	Program Riset dan Teknologi	Program Riset dan Teknologi	Program Riset dan Teknologi	Program Riset dan Teknologi	Program Riset dan Teknologi	Program Riset dan Teknologi	Program Riset dan Teknologi	Program Riset dan Teknologi	Program Riset dan Teknologi	Program Riset dan Teknologi	Program Riset dan Teknologi	Program Riset dan Teknologi		
												639,400,000											

No	Uraian	Persentase dari kegiatan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan pembangunan Pusat Mabung	Jumlah dokumen yang sesuai dengan kegiatan pembangunan Pusat Mabung	Jumlah dokumen yang sesuai dengan kegiatan pembangunan Pusat Mabung	% %	% %	% %	% %	% %	% %	% %	% %	% %	% %	% %	% %	% %
1	Sesuai dan Dokumentasi Hasil Kegiatan																
2	Sesuai dan Dokumentasi Hasil Kegiatan																
3	Sesuai dan Dokumentasi Hasil Kegiatan																
4	Sesuai dan Dokumentasi Hasil Kegiatan																
5	Sesuai dan Dokumentasi Hasil Kegiatan																
6	Sesuai dan Dokumentasi Hasil Kegiatan																
7	Sesuai dan Dokumentasi Hasil Kegiatan																
8	Sesuai dan Dokumentasi Hasil Kegiatan																
9	Sesuai dan Dokumentasi Hasil Kegiatan																
10	Sesuai dan Dokumentasi Hasil Kegiatan																
11	Sesuai dan Dokumentasi Hasil Kegiatan																
TOTAL																	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis masyarakat, *Community Base Development* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) kebijakan dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dan sasaran dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah selain menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Demikian untuk dilaksanakan.



NO	BAGIAN		KESESUAIAN			REKOMENDASI
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
1	PENDAHULUAN					
1.1	Latar Belakang	Pengertian ringkas Renja	v			
		Proses penyusunan Renja	v			
		Keterkaitan Renja dengan RKPD dan Renstra PD	v			
		Tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD	v			
1.2	Landasan Hukum	Dasar Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan	v			
1.3	Maksud dan Tujuan	Uraian Maksud dan Tujuan penyusunan Renja	v			
1.4	Struktur Penulisan	Uraian pokok bahasan dan susunan garis besar isi RENJA sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017	v			
2	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu					
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD (Tabel 2.1)	Kajian/review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu (n-2)	v			
		Perkiraan capaian tahun berjalan (n-1)	v			
		Capaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dengan memperhatikan :	v			
		1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja;	v			
		2 Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja;	v			
		3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja;	v			
		4 Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan	v			
		5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah	v			
		6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut	v			
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan PD (Tabel 2.2)	Capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan (JKK, IKM, IKU, IKD, NSPK dan SPM) sesuai tugas dan fungsi PD dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan PD	v			
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	Tingkat kinerja pelayanan PD	v			
		Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PD	v			
		Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran PD, pencapaian program nasional/internasional seperti SPM, SDGs	v			
		Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD	v			
		Formulasi isu-isu penting/rekomendasi untuk tindak lanjut	v			
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD (Tabel 2.3)	Membandingkan RKPD dengan analisis kebutuhan	v			
		Alasan dan catatan penting perbedaan	v			
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel 2.4)	Menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan, LSM, Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun Perangkat Daerah; serta usulan Musrenbang Tahun 2022 (yang dilaksanakan di Tahun 2021)	v			

3.1	Tujuan dan Sasaran Peringkat Nasional	Telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi PD	v			
3.2	Tujuan dan Sasaran Kerja PD	Berumum tujuan dan sasaran berdasarkan tujuan penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan kinerja Berutra Perangkat Daerah	v			
3.3	Program dan kegiatan (tabel 3.1)	Menetapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 dan perkiraan tahun 2023	v			Kegiatan yang mengahmode PLS akan dituangkan dalam GDS dan RAK sebagai lampiran RKA PD
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH						
4	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	Menguraikan tentang Rencana Kerja Tahun 2022 berdasarkan RKPD 2022 yang terdiri dari program dan kegiatan serta sumber pendanaan yang dapat diakses oleh Perangkat Daerah (APBD, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, DBSICHT ataupun CSR)	v			
5	PENUTUP					

Mengetahui,

Tim Verifikasi:

1.

DR. Dra. LISWAN ROBIYANA TULEE, ME.

Peneliti

NIP.19751120 199402 2 001

2.

HERMAN HIDAYAT, S. Kom.

Penata TK I

NIP. 19711205 200604 1 020



BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2022
Nomor : 050/482 /35.07.202/2021

Pada hari ini Kamis tanggal 5 bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang tahun dua ribu dua puluh dua yang dihadiri Tim Penyusun Rencana Kerja Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang sebagaimana Keputusan Bupati Malang, terlampir.

Setelah memperhatikan, menelaah dan mempertimbangkan, maka :

MENYEPAKATI,

- Kesatu : Tim Penyusun Rencana Kerja Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 sudah dibentuk sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
- Kedua : Sistematika Rencana Kerja Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Ketiga : Perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang sudah mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
- Keempat : Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang sudah sesuai dengan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
- Kelima : Menyelaraskan program dan kegiatan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dengan usulan kegiatan hasil kesepakatan pada Forum Perangkat Daerah Tahun 2021

Keenam : Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah wajib melakukan analisis gender yang dituangkan dalam *Gender Budget Statement* (GBS) dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang menjadi lampiran dalam penyusunan RKA perangkat daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui;

Kepala
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Malang



Dr. M. Hidayat, M.M., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19670830 199403 1 010

Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Malang



Ir. Tomie Herawanto, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19661126 199303 1 004